

## RPSEP-16

### **Kata siapa, Yogyakarta kota budaya?**

Hascaryo  
UPBJJ-UT Semarang

*Tata kelola pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik, bukan hanya urusan pemerintah, pejabat publik, atau pimpinan daerah. Tetapi urusan pembangunan – khususnya pembangunan mental dan social – menjadi tanggung jawab kreator komunikasi. Pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam isu aktual yang melibatkan publik, menjadi tanggung jawab kreator komunikasi. Kreator komunikasi berfungsi mengembangkan kekuatan modal sosial masyarakat, harus punya bekal teknik komunikasi politik yang kuat. Keandalan komunikasinya diartikan sebagai sebuah kekuatan riil yang akan menempatkan anggota komunitas publik dalam kesatuan fenomena sosial yang beradab. Untuk itu, kreator komunikasi perlu mempertimbangkan kesesuaian dan kebenaran substansi pesan yang akan dipublikasikan dan tetap mengedepankan praduga yang memang perlu pembuktian khusus.*

Jawa payah! Sekelumit pernyataan itu menjadi cerminan sikap reaktif seorang mahasiswa Yogyakarta yang menilai masyarakat Jawa – khususnya Yogyakarta – termasuk yang memprihatinkan. Meskipun sudah ditangani oleh aparat berwenang, namun tetap ada sesuatu yang perlu dikaji. Kajian utama fenomena Yogyakarta adalah tentang pandangan masyarakat pendatang tentang daerah ini.

Jika diruntut akarnya, pelanggaran sosial yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah karena ia sudah memiliki persepsi tertentu tentang masyarakat Yogyakarta. Ia berasumsi bahwa kualitas mental masyarakat tempat ia berasal, jauh lebih baik. Sementara, yang ia huni saat ini banyak tipu-tipu, kesungkanan, atau apapun itu yang senantiasa menghambat pola komunikasi publik.

Jenis komunikasi semacam ini, menurutnya, akan banyak menemui kegagalan. Bahkan akan cenderung menimbulkan konflik antarpelaku kepentingan. Dan yang dirugikan pasti masyarakat umumnya. Benarkah dalih dan asumsi yang semacam ini? Dalam kajian ini, penulis menyampaikan gagasan tentang perlunya analisis mengenai keberadaan kreator pembangunan mental sosial di sebuah wilayah. Kreator ini bisa saja

berasal dari pemimpin opini atau orang yang dianut oleh warganya. Kita mulai dari teori yang bersinggungan dengan masalah ini, yaitu teori interaksionalisme simbolik.

Pijakan teori ini adalah masalah individu atau pelaku interaksi. Beberapa ahli yang mendalami teori ini sepakat bahwa individu atau pelaku interaksi merupakan hal paling penting dalam konsep sosiologi. Diyakini oleh mereka bahwa individu menjadi objek yang – teknik dan kualitas interaksinya – telaah dan dianalisis secara langsung oleh individu yang lain. Sosiolog yang unggul di bidang interaksionalisme simbolik antara lain George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley. Keduanya juga fokus terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Bukti-bukti yang pernah mereka kemukakan kepada publik antara lain adalah kenyataan bahwa bahwa individu selalu berinteraksi dengan menggunakan simbol, yang di dalamnya berisi tanda, isyarat, dan kata-kata.

Langkah selanjutnya adalah menempelkan teori tersebut dengan fenomena mahasiswa Yogyakarta tadi. Benarkah simbol yang ia gunakan untuk berinteraksi dengan seseorang, telah menimbulkan friksi tertentu? Ternyata benar. Simbol berupa kata-kata yang pedas melalui media sosial, terbukti menyakiti kultur masyarakat Yogyakarta – yang ada di Pulau Jawa – bahwa mereka adalah kaum miskin, tolol, dan tak berbudaya. Gejolak sosial langsung muncul ketika pesan sosial itu menyinggung perasaan masyarakat Yogyakarta yang selalu diselaraskan dengan aspek halus, lembut, dan penuh kehati-hatian.

Masyarakat Yogyakarta enggan dinilai sebagai kaum dengan tiga sebutan tadi. Dengan berbagai dalih dan diskusi panjang, berakhirlah fenomena itu pada permohonan maaf. Meskipun pemberian maaf sudah dilakukan oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta, namun agaknya proses hukum akan tetap berjalan. Dari sikap perwakilan masyarakat Yogyakarta, bolehkah jika diasumsikan bahwa masyarakat Yogyakarta tidak lagi mudah memaafkan? Atau karena kasus yang muncul sudah sangat menyakiti? Atau karena ada hal lain yang menjadikan fenomena mahasiswi ini sebagai bom waktu?

Apapun yang melatari sikap perwakilan masyarakat Yogyakarta ini, ada baiknya dikaji tipis dalam paparan ini. Jika yang mendasari – ambil saja – adalah masalah sesuatu yang menyakitkan, maka perlu ditelusuri lagi mengenai latar belakang perwakilan ini. Keyakinan bahwa masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat pemaaf, hingga saat ini tidak melunturkan persepsi penulis. Masyarakat yang *nrima*, ikhlas, dan penuh kesabaran merupakan ujud muka Yogyakarta. Keyakinan persepsi ini tentu didasarkan pada pengalaman pribadi yang menyaksikan langsung perilaku masyarakat Yogyakarta.

Begitu gembira mereka melakukan semua aktivitasnya dengan senyum keceriaan. Namun, begitu dihentak oleh pernyataan mahasiswi tadi, sikap mereka berubah. Perubahan ini – ternyata – tidak serta mengubah keikhlasan masyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan silaturahmi. Masih ada yang menghendaki agar mahasiswi tersebut memperoleh sanksi hukum.

Seketika itu juga, persepsi penulis berubah haluan. Jika seseorang sudah meminta maaf dan yang bersangkutan bersedia menyampaikannya kepada publik, haruskah ia memperoleh sanksi yang lebih berat. Pernyataan ini bukan dilatari oleh belas kasihan atau hal lain yang berusaha meringankan sanksi bagi mahasiswi. Dasar pemikiran penulis yaitu karena ketidakyakinan penulis terhadap sikap yang ditempuh oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta. Namun, penulis yakin bahwa semua itu sudah dipertimbangkan dengan baik.

Kembali pada konsep tentang kreator tadi. Seorang kreator, seharusnya mempertimbangkan berbagai implikasi yang akan muncul jika ketetapanannya bernilai tinggi. Kreator pembangunan mental sosial masyarakat akan lebih bijak apabila ia memiliki keunggulan dalam hal komunikasi personal. Ia akan menjadi ujung tombak leburan wajah masyarakat yang diwakilinya. Keputusan untuk meneruskan fenomena mahasiswi ke ranah hukum, tentu sudah menjadi pilihan bijak. Bukan lantaran karena ada sikap atau pengalaman pribadi yang menimpa salah satu atau dua kreator tadi.

Mulyana (2007) menyatakan bahwa untuk menjadikan seorang kreator sebagai figur yang diberi amanah, sebaiknya ia juga berbekal kemampuan berkomunikasi yang baik, yaitu paling tidak dengan memahami konteks komunikasi yang terjadi. Dan kreator juga harus menggunakan model komunikasi yang sesuai. Model merupakan representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena yang berkembang. Yang pasti, sebuah model bukanlah fenomena itu sendiri. Akan tetapi, peminat komunikasi, termasuk kreator pembangunan mental sosial, sering mencampuradukkan model komunikasi dengan fenomena komunikasi.

Sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, model seharusnya dapat mempermudah penjelasan tersebut. Hanya saja model tersebut sekaligus mereduksi fenomena komunikasi. Artinya, ada nuansa komunikasi lain yang mungkin terabaikan dan tidak dijelaskan oleh model tersebut. Akibatnya, jika kita kurang hati-hati menggunakan model, model dapat menyesatkan kita. Inilah sisi negatif dari model. Inti pernyataan Mulyana adalah lebih pada kedewasaan publik dalam menyikapi sanksi yang

akan dikeluarkan oleh kreator. Publik boleh saja menentang atau menolak rencana sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku. Namun biasanya – lagi-lagi – karena keYogyaannya, masyarakat di wilayah itu enggan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Mereka khawatir dinilai sebagai warga pembangkang. Dianggap memusuhi keputusan komunitas. Akan dikucilkan dan tidak dihadiri kegiatan keluarganya oleh penduduk sekitar. Berbagai kekhawatiran yang tidak perlu itulah yang sudah seharusnya mulai luntur. Bukan berarti luntur untuk tak bernilai sosial, namun luntur karena kebutuhan peradaban. Sebaiknya, masyarakat di wilayah mana pun, jangan khawatir jika dianggap tidak beradab hanya karena menunjukkan suatu perilaku yang sewajarnya. Nilai adab yang diterima, bukan selalu berasal dari keputusan atas dasar sikap yang sejalan dengan kreator atau pemimpin opini publik.

Yang bersebarangan dengan kreator dan memang benar untuk diakui, sudah sepatutnya dijadikan acuan. Benarkah jika hal ini yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya sikap gengsi atau enggan mendengarkan pendapat pengikut kreator? Bisa saja demikian adanya. Apabila itu yang terjadi, kekekalan komunitas biasanya tidak akan bertahan lama. Akan banyak terjadi gejolak jika kreator senantiasa memaksakan kehendak dan tidak mau berkompromi dengan pengikutnya. Pengikut setia akan semakin meningkatkan kualitas kesetiaannya apabila ia diberi ruang untuk berbicara, meskipun menyimpang. Simpangan yang diberikan pun lebih didasarkan untuk kepentingan yang lebih baik dan beradab.

Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai hal-hal yang dibutuhkan agar terjadi komunikasi yang efektif. Dengan digunakannya model komunikasi yang sesuai, hal itu akan mampu merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dengan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Meskipun ada teori lain yang menyatakan bahwa model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model, namun hal itu tidak meruntuhkan teori pertama. Namun dalam teori kedua, dikuatkan oleh pernyataan bahwa model merupakan gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori tertentu. Dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

Apabila seluruh model komunikasi dipahami dan dipilih salah satu untuk dijadikan perangkat komunikasi, hasilnya pasti akan bagus. Perlu dipahami bahwa fungsi model komunikasi adalah untuk melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan

visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Kemungkinan besar, telah terjadi kemacetan komunikasi dalam komunitas perwakilan Yogyakarta. Belum semua aspirasi terwadahi dengan baik. Memang, ada yang pro dengan sikap dan keputusan perwakilan masyarakat Yogyakarta, tetapi ada juga yang kontra. Yang kontra mungkin jumlahnya lebih sedikit, dan belum tentu idenya tidak benar atau pantas. Mereka merupakan bagian minoritas dari sebuah komunitas yang bersuara.

Kenyataan yang memprihatinkan belakangan ini, justru sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah komunitas justru berlawanan dengan nilai sosial moral yang selama ini berkembang. Yang aktual saja, masalah pemilihan kepala daerah. Sudah jadi kemajuan luar biasa bagi masyarakat Indonesia bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, kini berubah. Perubahan ini langsung direspons dengan berbagai sikap yang – pada umumnya – menentang dan mempertanyakan. Prestasi mundur menjadi kebiasaan baru di negeri ini. Namun bagi yang diuntungkan dengan sikap akomodatif komunitas yang membawa aspirasinya, hal ini merupakan berkah. Berkah karena ide mereka tersampaikan dan dapat memuaskan dahaga batin untuk sementara waktu.

Harus diakui bahwa kepuasan batin menjadi indikator keberhasilan sebuah aspirasi. Semakin ngotot dan kencang usahanya, makin bagus pula hasilnya. Dengan catatan, didukung oleh mayoritas komunitas. Yang terjadi di Yogyakarta, kemungkinan juga sama. Sikap kuat pantang menyerah, akhirnya membuahkan air pelepas dahaga batin bagi pengusulnya. Untuk sementara waktu, mereka akan menyatakan bahwa dirinya menang dalam mempertahankan aspirasinya. Sikap rendah hati yang selama ini agung bagi masyarakat Yogyakarta, bagi penulis tampak memudar. Sikap ini akhirnya bias oleh keinginan sebagian perwakilan masyarakat Yogyakarta yang menginginkan mahasiswa memperoleh hukuman setimpal. Bahkan kalau bisa dua timpal. Inikah jawaban bahwa Yogyakarta adalah kota budaya? Bukankah budaya lekat dengan keteduhan dan ketenangan hati, batin, dan jauh dari nafsu negatif? Penulis pun menjadi kian limbung dengan kenyataan yang ada.

Padahal, di balik sikap rendah hati - pastilah semua tahu – akan mendatangkan rezeki luar biasa. Rezeki itu bisa saja berupa kekuatan lahir batin masyarakat Yogyakarta, kecerdasan emosional, ketangguhan beribadah, ketahanan budaya, atau kemandirian sosial. Semua aspek itu makin penting ketika sebuah wilayah menginginkan dirinya berbenah dan mendapatkan simpati dari masyarakat wilayah lain. Yogyakarta tak butuh

simpati! Agaknya, jika pernyataan atau paling tidak persepsi masyarakat adalah demikian, kekhawatiran pun akan mengikuti. Meskipun Yogyakarta sudah punya nama dan hati di masyarakat Indonesia dan negara manca, namun keteguhan pribadi si kota budaya harus terus dipertahankan. Keluhuran martabat budaya dan masyarakat menjadi jaminan klasikalitas wilayah ini.

Semua paparan ini akan terbantahkan jika kreator pembangunan sosial dan mental masyarakat Yogyakarta mampu mengendalikan dirinya. Pada saat yang sangat tepat seorang kreator akan mampu menarik simpati pengikutnya, sehingga ia pun akan diikuti semua ucapan dan keputusannya. Oleh karena itu, kreator yang cerdas tentu akan menempatkan konteks budaya yang diyakini dengan menghindari diri dari celah petaka budaya berkepanjangan. Petaka sosial pun diharapkan terhindari jika kreator mengutamakan kepentingan kelompok yang belum tentu semuanya memahami celah konflik tadi.

Bukan bermaksud berharap, namun tentu masyarakat Yogyakarta tidak bersedia jika warganya di wilayah lain diperlakukan sama karena masalah serupa. Kenyataan pahit akan makin mencekat ketika kita mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara kita sendiri. Untuk itu, kreator perlu cerdas dalam mengarahkan corong komunikasinya dengan kualitas substansi yang tak terbantahkan.

Distorsi pesan komunikasi, khususnya bidang komunikasi politik, besar kemungkinannya disebabkan oleh adanya manipulasi pesan. Kreator bijak tak perlu ceroboh dan gegabah dengan melakukan maneuver politik yang tendensinya adalah untuk menaikkan popularitas. Perlu *make up* pesan agar masyarakat pengikutnya tidak terjerumus dalam diskusi atau polemik yang merugikan pihak tertentu. Apalagi jika memang ada pesanan dari pihak tertentu yang berusaha mencari keuntungan, popularitas, atau ada keinginan untuk menjadikan Yogyakarta sejuk menjadi kota rusuh tak terkendali.

Meskipun kenyataan yang ada saat ini sudah lebih baik, namun alangkah lebih bagus jika sejak awal pada diri masyarakat Yogyakarta sudah tertanam watak antimanipulatif dan antikedangkalan yang difasilitasi oleh minimnya pemahaman komunikasi politik dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasilnya, pasti akan jauh lebih bagus jika peran komunitas mengedepankan kepentingan publik dan mengandalkan kepatuhan komunitas dalam pelaksanaan interaksi antaranggota komunitas. Namun sayangnya, dengan adanya fenomena mahasiswi tadi, icon bahwa Yogyakarta

merupakan kota budaya, agaknya makin menjauh dari kenyataan. Hal ini menjadikan sikap – khususnya pada diri penulis – yang tadinya sangat bersimpati dengan kultur dan egosentris masyarakat Yogyakarta yang pluaralis menjadi berantakan. Memang, jika ada yang menyatakan bahwa, hanya ada satu orang, yaitu penulis, yang hilang simpati, hal itu tak berarti apa-apa, memang benar begitu.

Akan tetapi, keindahan panorama Yogyakarta dalam benak tiap orang yang fanatik dengannya, harus dijaga dan dihormati. Selayaknya nasabah perbankan yang membutuhkan semua layanan apik dari pegawainya, masyarakat Yogyakarta pun sudah melakukan hal itu. Bahkan sudah lebih dari cukup. Tinggal sekarang saatnya adalah kebiasaan untuk saling mengingatkan jika ada individu, masyarakat, atau perwakilan masyarakat yang akan bersuara kepada publik dan mengatasnamakan Yogyakarta. Perlu dikaji kebenaran perwakilan itu agar tidak merugikan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

## **SIMPULAN**

Kreator komunikasi yang berfungsi mengembangkan kekuatan modal sosial masyarakat, harus berbekal teknik komunikasi politik yang kuat. Kehandalan komunikasi perlu dimaknai sebagai sebuah kekuatan riil yang akan menempatkan anggota komunitas publik dalam kesatuan fenomena sosial yang beradab. Keberadaban sebuah konflik sosial, tidak akan merambah ke berbagai hal yang tak perlu jika disampaikan secara apik dan santun. Untuk itulah, kreator komunikasi perlu mempertimbangkan kesesuaian dan kebenaran substansi pesan yang akan dipublikasikan dan tetap mengedepankan praduga yang memang perlu pembuktian khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Severin & Tankard. 1992. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses In The Mass Media*. New York: Langman Inc.

Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soeprapto, Riyadi. 2007. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar.

Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

<http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik.html>

<http://politik.kompasiana.com/2013/09/19/orasi-ilmiah-pramono-anung-wibowo-membangun-komunikasi-politik-beretika-593302.html>